

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelancaran aktivitas perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami masalah, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menata sektor perbankan, sehingga bank harus memiliki pondasi yang kokoh agar mampu bertahan dalam situasi yang tidak menentu dalam suatu negara. Selain itu, pendirian sebuah bank di Indonesia perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat, investor, maupun negara. Seperti yang terjadi pada beberapa puluh tahun lalu akibat adanya paket kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang menyatakan bahwa pengusaha dapat mendirikan bank baru dengan modal yang hanya Rp. 10 milyar, izin pembukaan kantor cabang baru dan kantor bank asing di beberapa provinsi, dengan berbagai kemudahan ini akhirnya meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Berdasarkan sumber dari berita yang dimuat diberbagai media massa dan pendapat ahli menyatakan bahwa peningkatan jumlah bank di Indonesia setelah adanya kebijakan Pakto 88 itu menimbulkan persaingan sengit dan dapat dikatakan tidak sehat serta mengabaikan prinsip *prudential banking*. Bank kurang berhati-hati dalam menarik dana dan mengucurkan kredit kepada masyarakat. Pengucuran kredit secara besar-besaran tersebut menimbulkan kredit bermasalah karena debitur tidak

mampu membayar jumlah kredit yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kondisi seperti ini menggerakkan para pengusaha yakni pemilik bank berusaha mencari uang sendiri dengan melakukan pinjaman ke luar negeri. Buntut dari tidak terselesaikannya kredit bermasalah dan utang ke luar negeri semakin membengkak ini menimbulkan kekacauan dalam sektor perbankan.

Keadaan yang semakin sulit ini diperparah dengan terjadinya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 akibat dari krisis nilai tukar rupiah yang diikuti penurunan kinerja ekonomi Indonesia. Salah satu yang terkena imbasnya adalah sektor perbankan yang mengalami keterpurukan. Ini terlihat ketika pemerintah terpaksa melikuidasi 16 bank yang kinerjanya dinilai tidak sehat dan meletakkan beberapa bank lain yang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Mengingat pentingnya peranan perbankan, maka mau tak mau bank harus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar mampu bertahan dan memenangi persaingan. Untuk memenangi persaingan, bank dituntut menerapkan langkah-langkah strategis agar menarik perhatian masyarakat dan investor. Bank dapat menawarkan berbagai produk dan layanan yang mampu menyedot perhatian dan ketertarikan masyarakat serta menciptakan struktur perbankan sehat sehingga dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan investor sebagai bentuk pencitraan diri dari kekacauan yang terjadi pada masa-masa sulit saat krisis melanda negeri ini.

Ada beberapa cara yang disarankan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk memulihkan kembali kondisi perbankan yang sehat adalah dengan cara penggabungan usaha. Kebijakan API ini didorong oleh adanya ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank umum pada tahun 2011 memiliki jumlah modal inti minimum sebesar Rp. 100 milyar. Keadaan ini memaksa bank untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kewajiban tersebut salah satunya dengan melakukan penggabungan usaha melalui akuisisi.

Program API mengenai penggabungan usaha ini ditanggapi positif terutama oleh bank-bank yang memiliki modal kecil dan mengalami kesulitan finansial. Penggabungan usaha melalui akuisisi merupakan salah satu usaha yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan merupakan cara jitu bagi bank dalam memperkuat struktur modalnya karena mendapatkan suntikan dana segar dari perusahaan yang mengakuisisinya dan bagi pihak pengakuisisi dapat membuka kesempatan baru dalam memaksimalkan keuntungan.

Di sisi lain, akuisisi dipandang sebagai keputusan yang justru dapat merugikan banyak pihak terutama pihak karyawan yang terpaksa memilih pensiun dini karena adanya gabungan dari dua perusahaan atau lebih. Sementara bagi pihak pemegang saham belum tentu memperoleh keuntungan yang maksimal setelah melakukan akuisisi. Selain itu, “banyaknya pelaksanaan akuisisi dilakukan oleh *acquirer* untuk menghindari pajak, menggelembungkan nilai aset perusahaan, menggusur manajemen pihak yang diakuisisi, dan memperbesar kompensasi para eksekutif sendiri.” Moin (2010:4). Melihat fenomena tersebut, keputusan akuisisi

harus didasari perencanaan matang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan tidak kalah pentingnya pemerintah harus membuat peraturan yang jelas tentang akuisisi dan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan dalam pelaksanaan akuisisi agar tidak merugikan banyak pihak terutama pemegang saham minoritas dan karyawan.

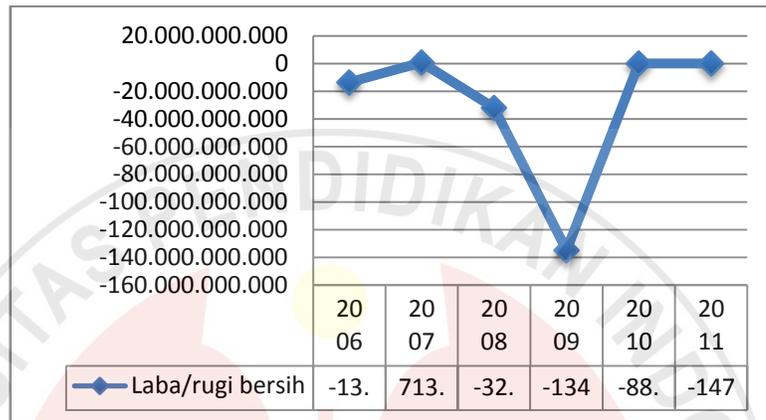
PT Bank Pundi Indonesia Tbk (dahulu bernama Bank Eksekutif Internasional) merupakan salah satu bank yang ikut dalam program pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan yakni melalui akuisisi. Berdasarkan laporan keuangan publikasi tahun 2006-2011, PT Bank Pundi Indonesia Tbk ini mengalami kerugian selama empat tahun terakhir yakni tahun 2008-2011. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Laba PT Bank Pundi Indonesia Tbk
Periode 2006-2011

Tahun	Laba /rugi bersih	Kenaikan/(penurunan) (%)
2006	(13.626.027.985)	-
2007	713.431.649	(0,05%)
2008	(32.012.458.027)	(44,87%)
2009	(134.870.059.675)	(4,21%)
2010	(88.646.000.000)	6,57%
2011	(147.253.000.000)	(1,67%)

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Pundi Indonesia Tbk

Untuk lebih jelas mengenai kecenderungannya, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Laba PT Bank Pundi Indonesia Tbk
Periode 2006-2011

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PT Bank Pundi Indonesia Tbk mengalami kerugian pada tahun 2006 sebesar Rp 13.626.027.985,- tahun 2007 memperoleh laba sebesar Rp. 713.431.649,- dan mengalami kerugian secara berturut-turut pada tahun 2008-2011 dengan presentase kerugian paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 44,87%. Menurut Herry Hartawan yang menjabat sebagai sekretaris Bank Eksekutif dan kini akhirnya diganti nama menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk mengungkapkan bahwa penyebab kerugiannya disebabkan tingginya kredit bermasalah pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Rasio NPL tertinggi pada tahun 2009 tercatat sebesar 18,39 %, padahal dalam ketentuan Bank Indonesia rasio ini tidak boleh melebihi 5 % dari jumlah kredit yang diberikan bank. Kredit bermasalah bank ini sebagian besar berasal dari nasabah perorangan, terutama pada kredit konsumsi kendaraan bermotor. Selain itu, pada tahun 2009 juga mengalami masalah

permodalan. Terkait dengan masalah tersebut, atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka penyehatan perbankan melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) disarankan melakukan akuisisi. Pada tanggal 30 Juni 2010, pemegang saham PT Bank Pundi Indonesia Tbk melakukan penawaran saham, kemudian PT Recapital Securities mendapat 61,02% saham, sedangkan IF Services Netherlands BV mendapatkan 24% saham. Pada tanggal 26 Juli 2010, PT Recapital Securities secara resmi menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Pundi Indonesia Tbk karena memiliki saham yang lebih besar dari IF Services Netherlands BV. (sumber: www.bankpundi.co.id).

PT Bank Pundi Indonesia Tbk melakukan akuisisi dengan PT Recapital securities bukan semata-mata karena saran dari API dengan berbagai masalah yang menimpanya. Mengingat, jika perusahaan melakukan pertumbuhan secara internal tentu perlu waktu yang relatif lama dari akuisisi karena membangun perusahaan tersebut dari awal dan biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Disisi lain, jika PT Bank Pundi Indonesia Tbk tidak melakukan akuisisi dikhawatirkan akan kesulitan dalam melakukan kegiatan operasionalnya karena lemahnya struktur permodalan pada saat sebelum akuisisi ditambah lagi tingginya kredit bermasalah

Pasca akuisisi, PT Bank Pundi Indonesia Tbk tidak mengalami kemajuan yang berarti karena pada tahun 2011 masih merugi sebesar Rp.147.253.000.000,-. Padahal idealnya suatu perusahaan yang telah melakukan akuisisi menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan karena mendapatkan suntikan dana segar dan manajemen yang lebih baik dari pihak pengakuisisi.

Pada prinsipnya akuisisi tidak hanya diterapkan pada bank-bank yang mengalami masalah saja. Sebagai perbandingan adalah Bank NISP yang dalam keadaan sehat dan termasuk salah satu bank yang mampu bertahan pada masa krisis finansial tahun 1997-1998 tetapi memutuskan untuk melakukan akuisisi.

Alasan untuk melakukan akuisisi ini diungkapkan oleh Presiden Direktur Bank NISP Pramukti Surdaudaja sebagai berikut:

Pertama, keinginan dan komitmen pendiri mempertahankan Bank NISP agar tetap eksis dan terus berkembang. Kedua, adanya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai gambaran peta perbankan Indonesia di masa depan akan sangat menantang. Ketiga, dengan masuknya OCBC ketergantungan NISP pada kepemilikan pendiri menjadi lebih ringan. Keempat, NISP memiliki rencana strategis yang sangat dinamis yakni keinginan menjadi bank nasional yang besar dan kuat. (sumber: <http://swa.co.id/listed-articles/pramukti-surjaudaja-akuisisi-ini-akan-memperkuat-nisp>).

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa keputusan untuk melakukan penggabungan usaha tidak hanya pada bank-bank yang dinilai tidak sehat saja, tetapi bank yang sehat pun dapat melakukan penggabungan usaha dengan berbagai alasan yang mendasari dan tujuan yang ingin dicapainya. Keputusan Bank NISP untuk melakukan akuisisi pada tahun 2004 dirasa cukup berhasil karena laba yang diperoleh setelah akuisisi cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2011, laba yang diperoleh tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 753.221.000.000,- (sumber: www.ocbcnisp.com). Perolehan laba yang semakin besar ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan setelah akuisisi. Kondisi tersebut tentunya semakin memperkuat Bank NISP dalam kancah perbankan nasional.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan akuisisi yakni dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis ini diperlukan untuk melihat kondisi suatu perusahaan yaitu dengan membandingkan rasio keuangan yang ada dalam unsur-unsur laporan keuangan bank antara sebelum dan sesudah akuisisi apakah terdapat peningkatan kinerja keuangan atau tidak. Masing-masing rasio keuangan dihitung berdasarkan rumus yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Hasil ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Adapun analisis yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggantikan PBI sebelumnya Nomor No. 6/10/PBI/2004 yakni analisis CAMELS. CAMELS mencakup beberapa faktor yakni: faktor permodalan (*Capital*), Kualitas Asset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*liquidity*), dan Sensivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*).

Dalam penelitian ini tidak menggunakan faktor manajemen karena hanya Bank Indonesia yang dapat melakukan penilaian kinerja terhadap faktor tersebut dan bersifat rahasia serta tidak dipublikasikan. Bank Indonesia mengajukan sebanyak 100 pertanyaan kepada bank yang bersangkutan, setiap jawaban diberikan bobot untuk selanjutnya ditransformasikan kedalam analisis CAMELS dan penelitian ini tidak menilai faktor sensitivitas terhadap risiko pasar karena keterbatasan data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini tidak mengukur aspek CAMELS secara

keseluruhan, tetapi mengukur rasio keuangan yang ada dalam aspek permodalan (*Capital*), Kualitas Asset (*Asset Quality*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*liquidity*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT Bank Pundi Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Akuisisi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebelum akuisisi.
2. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sesudah akuisisi.
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini ditetapkan lebih dahulu agar dalam pelaksanaan nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah selanjutnya. Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi apakah ada perbedaan kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebelum akuisisi.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank Pundi Indonesia Tbk sesudah akuisisi.
- c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan kajian bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT Bank Pundi Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Akuisisi”.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah dalam menganalisis fakta, fenomena, dan peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

b. Bank

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT Bank Pundi Indonesia Tbk dalam pengelolaan manajemen dan keuangannya sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal serta bahan pertimbangan keputusan dimasa yang akan datang.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah di kalangan akademis dan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya